



LEMBAR FAKTA

2014

Praktek-Praktek REDD+ yang Menginspirasi

MEMBANGUN KESIAPAN REDD+ MELALUI PEMETAAN DAN PERENCANAAN PENGGUNAAN LAHAN PARTISIPATIF DI INDONESIA

GAMBARAN SEKILAS

Apa

» Perencanaan dan pemetaan partisipatif penggunaan lahan membangun kesiapan REDD+ dan memperkuat kepemilikan lahan diantara masyarakat lokal dan masyarakat adat di Kabupaten Kutai Barat, Indonesia.

Siapa

- » Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat
- » Kementerian Kehutanan
- » BAPPEDA Kutai Barat
- » Masyarakat adat dan masyarakat lokal (IPLC)
- » WWF

Di mana

Kabupaten Kutai Barat, Indonesia

Kapan

2009–2012

Tim Proyek

Arif Data Kusuma
WWF-Indonesia
akusuma@wwf.or.id



© WWF-CANON / SIMON RAWLES

RINGKASAN

Praktek REDD+ yang Menginspirasi ini menyoroti perencanaan dan pemetaan partisipatif penggunaan lahan yang membangun kesiapan REDD+ dan memperkuat penguasaan lahan diantara masyarakat lokal dan masyarakat adat di Kabupaten Kutai Barat, Indonesia. Melalui kegiatan ini, setiap anggota masyarakat mampu mengidentifikasi lahan dan penggunaannya saat ini, mengembangkan pengetahuan tentang isu-isu penggunaan lahan, menjembatani perbedaan, dan berbagi prioritas untuk penggunaan lahan desa dan sumber daya alam di masa mendatang. Proses ini berguna untuk mempersiapkan masyarakat lokal dan masyarakat adat untuk melaksanakan REDD+ dan dampak potensial atas penggunaan lahan serta memberdayakan kelompok masyarakat untuk menyusun rencana dan visi masa depan.

KONTEKS

Kabupaten Kutai Barat memiliki beberapa keanekaragaman hayati dan budaya paling kaya di dunia. Terletak di *Heart of Borneo* (Jantung Kalimantan) yang masih alami dan terpencil, terbentang di bagian lebih atas Sungai Mahakam yang berkelok-kelok, daerah ini memiliki 2,4 juta hektar hutan tropis, sebuah perpaduan tanaman dan satwa liar yang sangat hidup, dan sekitar 167.000 penduduk tinggal di desa-desa yang tersebar berjauhan satu sama lain.

Diantaranya adalah penduduk asli dan dikenal sebagai suku Dayak yang telah tergantung pada sumber daya hutan dari generasi ke generasi. Suku Dayak mewakili beberapa kelompok etnis dan bahasa yang berbeda, termasuk sistem kepemilikan lahan yang juga berbeda. Orang Tunjung dan Benuaq, misalnya, memiliki sistem

KETIKA MULAI MELAKSANAKAN REDD+ DI KUTAI BARAT PADA TAHUN 2010, WWF BERFOKUS PADA PERENCANAAN DAN PEMETAAN PARTISIPATIF PEMANFAATAN LAHAN SEBAGAI SARANA UNTUK MEMBANGUN KESIAPAN REDD+ DAN MENGAMANKAN SATU SUARA BAGI MASYARAKAT LOKAL DAN MASYARAKAT ADAT DALAM KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DAN RENCANA-RENCANA PEMBANGUNAN PADA TINGKAT REGIONAL DAN NASIONAL.

kepemilikan lahan pribadi yang dikenal sebagai Lembo, sementara suku-suku lain, seperti Kenyah, memiliki sistem kepemilikan lahan komunal. Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan tersebut, masyarakat lokal dan masyarakat adat Kutai Barat saling berbagi warisan pengelolaan lahan yang berkelanjutan dan diatur oleh adat, atau lembaga adat yang berkisar pada pemanfaatan lahan secara tradisional, seperti resapan air, wilayah berburu, dan pengumpulan bahan makanan alami serta tanaman obat.

Tradisi-tradisi tersebut menghadapi banyak tantangan karena lahan yang mengikat mereka berubah. Indonesia kehilangan 1,17 juta hektar hutan per tahun karena penebangan hutan, pertambangan, dan penyebaran perkebunan kelapa sawit dan serat kertas yang tidak berkelanjutan. Di Kutai Barat, hampir separuh lahan telah dialokasikan untuk pembangunan melalui konsesi yang diberikan oleh pemerintah dan sering tumpang tindih dengan wilayah lahan tradisional. Hanya sedikit perlindungan yang ada untuk wilayah-wilayah tersebut, karena hak-hak adat atas tanah tersebut tidak memiliki kekuatan yang sama dengan peraturan dan konsesi pemerintah. Di tengah perubahan yang cepat dan tekanan pembangunan yang kuat serta pilihan jalur hukum yang terbatas, masyarakat lokal dan penduduk asli mendapati diri mereka dengan visi yang saling bertentangan dan tidak memiliki suara untuk masa depan hutan.

Ketika mulai melaksanakan REDD+ di Kutai Barat pada tahun 2010, WWF berfokus pada perencanaan dan pemetaan partisipatif pemanfaatan lahan sebagai sarana untuk

membangun kesiapan REDD+ dan mengamankan satu suara bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana pembangunan pada tingkat regional dan nasional. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat memperoleh kesadaran akan masalah hukum, lingkungan dan ekonomi di seputar penggunaan lahan, keterampilan dan kapasitas mereka untuk pembangunan dan perencanaan berkelanjutan, dan pengakuan atas pengetahuan tradisional dan hak-hak adat mereka.

PERUBAHAN YANG DIHARAPKAN

- Membangun kesadaran tentang berbagai jenis dan pemanfaatan lahan dalam masyarakat adat dan masyarakat lokal Kutai Barat
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal mengenai nilai-nilai ekonomi, ekologi dan sosial budaya dari lahan mereka, serta kemampuan menyeimbangkan dan memanfaatkan nilai-nilai tersebut
- Mengembangkan katalog dan peta wilayah lahan adat dan sumber daya yang akurat dan secara bersama menyusun rencana untuk pemanfaatannya di masa depan
- Menciptakan dasar untuk pembagian manfaat melalui pembayaran untuk layanan ekosistem dan untuk pengakuan serta dukungan pemerintah untuk hak-hak adat atas lahan

© ALAIN COMPOST / WWF-CANON





PEMANGKU KEPENTINGAN

PEMANGKU KEPENTINGAN LANGSUNG

TERLIBAT DALAM DISAIN PROYEK, PEMBUATAN KEPUTUSAN, DAN PEROLEHAN MANFAAT

- Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat
- Kementerian Kehutanan
- BAPPEDA Kutai Barat
- Penduduk asli dan masyarakat lokal (IPLC)
- WWF

PEMANGKU KEPENTINGAN STRATEGIS

MENYEDIKAN MATERIAL, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN SUMBER DAYA LAINNYA

- Norwegian Agency for Development and Cooperation (NORAD)
- Forest Investment Programme (FIP)
- Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)

PEMANGKU KEPENTINGAN TIDAK LANGSUNG

MEMPENGARUHI PRAKTEK TANPA TERLIBAT SECARA LANGSUNG

- Organisasi-organisasi masyarakat sipil





© ALAIN COMPOST / WWF-CANON

KERANGKA WAKTU PERKEMBANGAN PROYEK

2009: Indonesia mengembangkan sebuah Rencana Aksi Nasional untuk Penanganan Perubahan Iklim, melibatkan diri dalam REDD+ dan mendirikan Heart of Borneo — dan, dengan itu, Kutai Barat—sebagai kawasan strategis nasional.

2010: pembangunan kapasitas masyarakat, pemetaan dan inventarisasi hutan dimulai dengan didirikannya kantor WWF Kutai Barat.

2011: Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian pertukaran hutang-untuk-alam yang menghasilkan investasi sebesar USD 28,5 juta untuk membantu melindungi hutan-hutan Kalimantan, dengan Kutai Barat sebagai salah satu dari tiga kabupaten prioritas.

2011: Selama beberapa bulan, zonasi dan perencanaan partisipatif pemanfaatan lahan masyarakat dilaksanakan di Kutai Barat melalui pertemuan, lokakarya dan pelatihan di lapangan. Berbekal alat-alat dan pengetahuan partisipatif, penduduk desa mulai mengidentifikasi dan memetakan zona pemanfaatan lahan dan kategori saat ini (kawasan lindung, daerah yang secara sejarah dan budaya penting, pemukiman, areal pertanian, perkebunan, dll) termasuk nilai ekonomis, menentukan batas-batas masyarakat dan mendiskusikan potensi konflik pemanfaatan lahan dengan masyarakat sekitar. Anggota masyarakat juga terlibat dalam simulasi yang mengeksplorasi nilai dan penggunaan lahan di masa depan dalam beberapa skenario REDD+ yang berbeda-beda.

2011: Oktober hingga Desember, WWF bekerjasama dengan penduduk desa di Long Pahangai I & II, Linggang Melapeh, Long Tuyu' dan Long Isun dalam menyusun draft peraturan untuk mendapatkan pengakuan hukum atas rencana pemanfaatan lahan mereka, Kawasan Konservasi Berbasis Masyarakat yang dialokasikan untuk pemanfaatan tradisional, serta kegiatan-kegiatan manajemen berbasis masyarakat; enam draft peraturan disetujui dan diadopsi.

2012: Pada bulan Desember, pemerintah Indonesia menyetujui sebuah proposal untuk membagi dua Kabupaten Kutai Barat, menciptakan Kabupaten baru, Mahakam Ulu.

2012: Perencanaan tata guna lahan partisipatif berbasis masyarakat di desa Batu Majang dan Penarung menghasilkan peta 3D penggunaan secara adat dan rencana lima sampai sepuluh tahun untuk penggunaan lahan di masa depan berdasarkan simulasi dan analisis dampak REDD+.

PENCAPAIAN

- Penduduk desa terlibat dalam proses pemetaan dan perencanaan yang benar-benar partisipatif. Anggota masyarakat dari berbagai kelompok kepentingan, kelompok usia dan jender—yang memiliki perspektif yang berbeda tentang nilai-nilai dan pemanfaatan lahan—bertukar cerita dan gagasan serta menemukan landasan bersama untuk membantu mereka menentukan visi untuk pemanfaatan lahan di masa depan. Dalam proses tersebut, anggota masyarakat juga mendapatkan pengetahuan baru tentang masalah-masalah kebijakan, hukum, lingkungan, ekonomi dan sosial budaya yang meliputi pemanfaatan lahan mereka dan bagaimana implementasi REDD+ akan mempengaruhi isu-isu tersebut.
- Tiga desa (Batu Majang, Penarung dan Linggang Melapeh) mengembangkan peta tiga dimensi penggunaan lahan mereka yang mencatat dan memperkuat pengetahuan dan praktek-praktek tradisional. Dengan menggunakan bahan-bahan sederhana — seperti koran, kayu dan lem—dan, bila ada, citra satelit, para penduduk desa membuat representasi visual lahan mereka dan pemanfaatannya. Peta-peta tersebut kemudian berfungsi sebagai katalog sumber daya alam masyarakat yang berharga serta sebagai wadah dialog tentang lahan, sejarahnya, dan rencana serta kepentingan untuk masa depannya.



© WWF-CANON / SIMON RAWLES

- Anggota masyarakat mengembangkan rencana pemanfaatan lahan berdasarkan nilai-nilai, prioritas dan proyeksi mereka sendiri. Latihan pemetaan partisipatif yang dilakukan ditambah dengan diskusi tentang nilai ekonomi dari berbagai kategori penggunaan lahan (dengan skema pembayaran jasa ekosistem [PES]), misalnya) serta serangkaian simulasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengeksplorasi nilai dan pemanfaatan lahan mereka dengan skenario-skenario REDD+ dan perencanaan desa yang berbeda-beda. Warga desa kemudian mengambil informasi dan membuat perkiraan berdasarkan proses-proses tersebut untuk menyusun rencana pemanfaatan lahan masyarakat selama lima sampai sepuluh tahun ke depan.

TANTANGAN

- **Proses pemetaan dan perencanaan partisipatif belum sepenuhnya terbuka.** Meskipun proses ini memang menjembatani banyak perbedaan—mendekatkan anggota masyarakat dari berbagai usia dan sebagian perempuan—mereka belum cukup mewakili semua kelompok. Kaum lanjut usia masih kurang terwakili, seperti juga halnya perempuan. Kelompok-kelompok yang terpinggirkan ini harus diintegrasikan ke dalam proses pemetaan dan perencanaan berbasis masyarakat agar kegiatan ini memiliki legitimasi dan jangkauan yang lebih besar.
- **Upaya-upaya WWF untuk membangun kapasitas dan memfasilitasi proses-proses perencanaan desa partisipatif di Kutai Barat sangat terbatas—hanya tiga dari lebih dari 200 desa telah ikut ambil bagian.** Banyak desa belum terlibat dalam proses ini, dan mereka secara geografis terpencil dan sulit dijangkau. Tanpa cukup fasilitator terlatih untuk melibatkan para penduduk desa dalam perencanaan dan pemetaan partisipatif penggunaan lahan, akan sulit untuk membawa proses ini kepada semua masyarakat yang seharusnya akan memperoleh manfaat.

PENDUDUK DESA TERLIBAT DALAM PROSES PEMETAAN DAN PERENCANAAN YANG BENAR-BENAR PARTISIPATIF. ANGGOTA MASYARAKAT DARI BERBAGAI KELOMPOK KEPENTINGAN, KELOMPOK USIA DAN JENDER—YANG MEMILIKI PERSPEKTIF YANG BERBEDA TENTANG NILAI-NILAI DAN PEMANFAATAN LAHAN—BERTUKAR CERITA DAN GAGASAN SERTA MENEMUKAN LANDASAN BERSAMA UNTUK MEMBANTU MEREKA MENENTUKAN VISI UNTUK PEMANFAATAN LAHAN DI MASA DEPAN.

100%
DAUR ULANG

VISI KAMI

Program Hutan dan Klimat berusaha untuk memastikan bahwa konservasi hutan-hutan tropis sebagai simpanan karbon dicapai dengan pembangunan ekonomi hijau yang memberikan manfaat untuk manusia, iklim, dan keanekaragaman hayati dengan cara-cara yang transformatif.

f / wwf



/ wwfforestcarbon

Foto dan gambar © WWF atau digunakan dengan ijin.
Teks tersedia dengan lisensi *Creative Commons*.



Why we are here
To stop the degradation of the planet's natural environment and to build a future in which humans live in harmony with nature.
www.panda.org/forestclimate

© WWF Registered Trademark Owner © 1986, WWF - World Wide Fund for Nature (formerly World Wildlife Fund), Gland, Switzerland

- Sebuah kerangka hukum yang memberikan pengakuan atau perlindungan yang tidak memadai pada hak-hak adat dan penggunaan tanah secara tradisional membatasi efektivitas pemetaan dan perencanaan partisipatif pemanfaatan lahan. Keputusan untuk membagi Kabupaten Kutai Barat menjadi dua dan perubahan politik yang diakibatkannya akan memperumit masalah ini.

PELAJARAN YANG DIPEROLEH

- Proses partisipatif yang berhasil membutuhkan waktu dan kepercayaan. Untuk mendukung dan berpartisipasi dalam upaya untuk mengelola lahan secara berkelanjutan, masyarakat lokal dan masyarakat adat Kutai Barat pertama-tama harus mempercayai proses dan para fasilitatornya. Waktu, komitmen dan perhatian khusus yang diberikan membangun kepercayaan tersebut, yang pada gilirannya mempermudah komunikasi dan penerimaan gagasan tentang REDD+ dan konservasi. Hal tersebut terjadi dalam keterlibatan dengan pemerintah daerah dan masyarakat lokal serta desa-desa, seperti Linggang Melapeh dan Long Pahangai. Dibutuhkan waktu dalam membangun kepercayaan dengan pemerintah daerah termasuk yang ada di desa-desa kabupaten bagi keberhasilan upaya WWF di Kutai Barat.

- Alat partisipatif membuat masyarakat lokal bertanggung jawab atas penghidupan mereka sendiri. Perencanaan pemanfaatan dan pemetaan lahan berbasis masyarakat tidak hanya membekali masyarakat dengan model visual hutan mereka —hal itu memperlihatkan hubungan antara bentang lahan masyarakat dan mata pencahariannya, serta menciptakan sebuah forum di mana para anggota masyarakat bisa mendiskusikan hubungan tersebut dan membuat rencana untuk pengembangannya seiring waktu. Penduduk desa akan muncul dari dialog-dialog yang dihasilkan dengan kebanggaan masyarakat yang lebih kuat, pemahaman yang sama, dan rasa kepemilikan yang lebih besar serta visi untuk masa depan.
- REDD+ tidak dapat berjalan tanpa keahlian dan masukan dari masyarakat lokal dan masyarakat adat. Mereka yang hidup di dalam dan bergantung pada sumber daya hutan adalah yang paling mengerti tentang hal itu. Selama kegiatan pemetaan dan perencanaan partisipatif, anggota masyarakat berbagi kekayaan pengetahuan tradisional dan menghasilkan baseline yang rinci mengenai pemanfaatan lahan di masa lalu dan masa kini, terutama melalui peta tiga dimensi. Mengintegrasikan keprihatinan, kebutuhan, visi dan pengetahuan mereka ke dalam rencana pemanfaatan lahan di tingkat yang lebih tinggi dan strategi-strategi REDD+ akan meningkatkan legitimasi dan kekuatan mereka untuk mempengaruhi perubahan yang langgeng.

